

KI HADJAR DEWANTARA PELOPOR PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh : Made Suastika, Nym. Kutha Ratna, dan Ketut Ardhana*)

ABSTRACT

As a national hero, Ki Hajar Dewantara has contributed to many fields such as culture, education, the state system, politics, and art. The changes he has made on his name from Raden Mas Suwardi Suryaningrat into Suwardi Suryaningrat and finally into Ki Hajar Dewantara shows how greatly he has sacrificed in his struggle for his country's independence and development.

Particularly in the educational field, through Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara has given very great contributions to the development of Indonesian human resources. He has implanted as an investment the basic characteristics of modern education that he has unearthed from the treasury of his country's traditions in combination with methods and theories originating abroad. The conceptions made through Taman Siswa are of great use in anticipating the country's mental degradation and national disintegration.

Key Words: Taman Siswa, national education, colonial education, national consciousness, deconstruction.

*) Penulis adalah dosen FS Universitas Udayana Denpasar

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai Ki Hadjar Dewantara sudah banyak. Aktivitasnya sebagai politikus, negarawan, budayawan, dan pedagog di satu pihak, dan jasa-jasanya sebagai pendiri perguruan nasional Taman Siswa di pihak yang lain, menyebabkan tokoh ini dianggap sebagai salah seorang pahlawan nasional. Meskipun demikian, untuk menggali kembali kompetensi tradisi, solidaritas primordial, dan khazanah masa lampau pada umumnya, dalam rangka mengantisipasi disintegrasi bangsa, masih sangat banyak masalah yang perlu diungkapkan. Analisis yang dilakukan sekarang ini mencoba menjawab permasalahan sebagai akibat polarisasi kedua aspeknya, yaitu Ki Hadjar Dewantara sebagai manusia Jawa dan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan swasta dalam kaitannya dengan perkembangan pendidikan modern.

Kajian ini merupakan bagian dari sebuah penelitian yang dilakukan dalam rangka menopang terlaksananya Program Doktor (S3) Kajian Budaya, Fakultas Sastra, Universitas Udayana. Data diperoleh melalui penelitian pustaka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

KI HADJAR DEWANTARA MENDEKONSTRUKSI RADEN MAS SUWARDI SURYANINGRAT

Secara historis pragmatis kebudayaan nasional lahir bersamaan dengan bahasa nasional, pada hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 1908. Meskipun demikian, dengan adanya depresi pemerintah kolonial, bentuk-bentuk yang berkaitan dengan nasionalisme terbatas hanya sebagai semangat. Isu-isu tersebut secara aklamasi diakui pada saat dicetuskannya Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, dan secara yuridis formal dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Masalah-masalah mengenai kebudayaan nasional kembali

menonjol justru dalam era reformasi. Bangkitnya kebebasan di segala bidang tidak dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan bangsa secara keseluruhan, tetapi justru membawa bangsa ini ke dalam perpecahan, sebagai disintegrasi. Dalam hubungan inilah diperlukan persamaan pandangan, pembaharuan semangat, dalam bentuk kebudayaan nasional. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memahami kembali eksistensi pendidikan nasional, dalam hubungan ini perguruan Taman Siswa.

Sebagai bagian integral kebudayaan nasional, pendidikan nasional mesti dipahami dalam kaitannya dengan semangat kebangsaan, dengan mekanisme sistem sosiokultural secara keseluruhan. Dua indikator yang perlu dipertimbangkan, yaitu (1) sulitnya memperoleh pendidikan sebagai akibat kebijakan pemerintah penjajahan, dan (2) semangat para pemuda untuk memajukan bangsa sebagai akibat kemajuan zaman, khususnya sebagai manifestasi pengalaman-pengalaman yang diperoleh di luar negeri.

Siklus kehidupan Dewantara sejak masa kanak-kanak hingga dewasa menunjukkan dengan jelas personalitas tokoh dalam kaitannya dengan cita-cita kemerdekaan, khususnya dalam mengantisipasi terbentuknya kebudayaan dan pendidikan nasional. Di satu pihak, sebagai elite birokrasi, Dewantara justru lebih banyak berjuang untuk kepentingan masyarakat kelas menengah bawah, di pihak yang lain, sebagai elite politik dan intelektual beliau berjuang untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pergantian nama dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Suwardi Suryaningrat, dan kemudian berubah menjadi Ki Hadjar Dewantara jelas mengalami proses yang panjang. Diduga ada tiga indikator yang berperan dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan nama tersebut. *Pertama*, indikator personal, yang dipicu oleh obsesi-obsesi Suwardi Suryaningrat sendiri yang ingin menyamakan diri dengan masyarakat biasa. *Kedua*, indikator keluarga, yang dipicu

oleh konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan. *Ketiga*, indikator yang bersifat kebangsaan, yang dipicu oleh kondisi masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mendekonstruksi narasi-narasi feodal dan aristokrat (Douwes Dekker dalam Bambang Sokawati Dewantara, 1989: 34—35). Sulit untuk menentukan indikator mana yang dominan sebab ketiganya bersifat saling melengkapi. Meskipun demikian, dapat diduga bahwa indikator yang kedua, yaitu perpecahan dalam keluarga Suwardi Suryaningrat merupakan sebab pokok, yang kemudian ditopang oleh kedua indikator yang lain (wawancara tanggal 4 April 2002).

Suwardi Suryaningrat sendiri mungkin tidak pernah memikirkan secara mendetail nama baru sebagai pengganti namanya yang asli. Hal ini dapat dibuktikan, pertama, sebagai seorang intelektual yang sangat banyak menulis, Dewantara belum pernah menulis secara agak lengkap mengenai pergantian nama tersebut, termasuk dalam pernyataan resmi yang dikemukakan tanggal 3 Februari 1928, yaitu pada ulang tahunnya yang ke-40. Kedua, nama Ki Ajar (Ki Hadjar) itu sendiri secara spontanitas diberikan oleh Raden Mas Sutatmo Suryokusumo, sepupunya, dalam suatu diskusi Selasa Kliwon. Menurut Bambang Sokawati Dewantara (1989: 19—33), ketika kecil, sebagai nama *paraban*, Suwardi Suryaningrat disebut Si Jemblung karena badannya kurus dan perutnya buncit. Nama tersebut kemudian disempurnakan menjadi Jemblung Joyo Trunogati, Jemblung yang diharapkan akan memahami banyak ilmu. Ketika berada di negeri Belanda, karena kesalahan lafal, Suwardi Suryaningrat pernah dipanggil dengan nama Meneer Suryanamegat.

Sejarah telah mencatat nama Ki Hadjar Dewantara sebagai salah seorang tokoh dalam dunia pendidikan nasional, bukan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dewantara melepaskan atribut elite priyayi birokrasi sekaligus mendekonstruksi berbagai kekuasaan yang hanya berpusat di istana menuju ke pusat-pusat yang lain, menyediakan makna bagi pluralisme budaya. Secara etimologis, Ki Ajar (Ki Hadjar)

mengacu pada pengertian ahli mendidik, sedangkan Dewantara mengacu pada fungsi-fungsi mediator para Dewa (Tsuchiya, 1987: 64). Sebagai tokoh perjuangan nasional, Dewantara pada dasarnya juga memediasi trilogi bangsawan, ulama, dan masyarakat pada umumnya.

Secara mitologis pergeseran nama tersebut menandai perubahan dari *satrio pinandito* (ksatria yang berjiwa pendeta) ke *pandito sinatrio* (pendeta atau guru yang juga bersedia mengangkat senjata untuk membela nusa dan bangsanya) (Tauchid, 1968: 19). Apa pun alasannya, pergantian nama merupakan masalah subjektif, dalam hal ini menyangkut masalah-masalah pribadi Dewantara. Tetapi dalam kaitannya dengan peranan Taman Siswa terhadap perkembangan kebudayaan dan kebudayaan Indonesia, pergantian nama tersebut memiliki implikasi yang sangat penting. Sebagai tokoh, apabila ingin menyatukan diri dengan masyarakat, maka sikap pertama yang dilakukan adalah menyamakan, menyetarakan diri kepadanya. Sebagai langkah awal dalam usaha untuk memajukan masyarakatnya, salah satu cara yang ditempuh oleh Suwardi Suryaningrat adalah mengganti namanya.

PENDIDIKAN NASIONAL TAMAN SISWA

Berbagai obsesi yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang terjajah timbul sebagai akibat segregasi sosial yang terlalu keras. Bangsa Barat memandang bangsa-bangsa Timur sebagai bangsa yang memiliki tingkat hidup yang lebih rendah. Mitos kulit putih dan kulit berwarna menjiwai pola-pola perilaku masyarakat Barat terhadap masyarakat Timur, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam hubungan formal antarlembaga. Sebagai akibatnya, timbullah kesadaran psikologis untuk mempertahankan diri, yaitu dengan cara terlibat aktif dalam dunia pendidikan.

Pendidikan dan pengajaran, khususnya bagi negara-negara yang terjajah, dianggap sebagai kebutuhan pokok untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonialisme. Tugas ini jelas merupakan tugas yang sangat berat, dengan alasan (1) telah terjadinya involusi mentalitas dalam diri bangsa Indonesia sebagai akibat penjajahan yang berkepanjangan, (2) kuantitas, heterogenitas, dan penyebaran populasi yang mesti diberikan pendidikan, (3) kesulitan dalam melaksanakan program pendidikan sebagai akibat kondisi-kondisi geografis, etnis, dan keragaman adat kebiasaan, (4) keterbatasan fasilitas dalam berbagai aspeknya, terutama sarana-sarana sosial ekonomis, dan (5) adanya tekanan-tekanan pihak pemerintah kolonial. Empat alasan pertama merupakan faktor-faktor internal, sedangkan alasan yang terakhir termasuk faktor eksternal, yang dengan sendirinya secara resmi telah teratasi tanggal 17 Agustus 1945.

a. Timbulnya Kesadaran Nasional

Perhatian terhadap aspek-aspek pendidikan dan pengajaran yang tampak jelas antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, akhirnya memberikan hasil positif, khususnya pada periode 1920-an hingga 1930-an. Kemajuan aspek-aspek edukatif tersebut menunjukkan hasil-hasilnya paling sedikit melalui lima bidang, yakni (1) semangat nasionalisme yang tampak melalui gerakan-gerakan nasional, (2) semangat untuk menyamakan diri dengan bangsa-bangsa lain yang ditunjukkan melalui kerja sama luar negeri, (3) semangat untuk membangun suatu kebudayaan baru yang ditunjukkan melalui usaha-usaha untuk mengadopsi unsur-unsur kebudayaan asing yang sesuai dengan jiwa kebudayaan asli, (4) semangat untuk memiliki bahasa nasional dengan cara mengadopsi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, dan (5) semangat kreativitas yang ditunjukkan melalui kegiatan mencipta, khususnya dalam karya seni.

Sebagai bagian integral kesadaran nasional, kesadaran terhadap perkembangan pendidikan dan pengajaran tidak terbatas di kota-kota besar, tetapi telah meluas hingga ke wilayah-wilayah yang terpencil. Dalam hubungan inilah tampak kembali peranan kebudayaan asli, sebagai *cultural heritage*, yaitu pendidikan dengan sistem *paguron* dan sistem pondok yang telah ada sejak zaman dahulu. Secara etimologis, menurut Dewantara (Majelis Luhur Taman Siswa, Vol. IA, 1962: 56—59) sistem *paguron* mengacu pada tempat tinggal guru, atau pusat studi itu sendiri. Sekolah adalah rumah guru, murid itu sendiri datang ke rumah guru untuk belajar. Berbeda dengan sekolah-sekolah modern yang didatangi oleh murid pada jam-jam tertentu, sistem *paguron* yang dilakukan dalam Taman Siswa selalu dipenuhi oleh siswa, sejak pagi hingga malam. Mata pelajaran yang diperoleh dalam sistem *paguron* tidak terbatas dalam mata pelajaran yang umum saja, tetapi juga meliputi berbagai keterampilan, seperti: kesenian, olah raga, dan dan budi pekerti.

Berbeda dengan sistem pendidikan kolonial, pendidikan dan pengajaran nasional, khususnya Taman Siswa, sejak semula telah dikemas atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang sejajar dengan masyarakat Indonesia. Artinya, Taman Siswa tidak dimaksudkan untuk mendidik golongan tertentu, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuan pokok yang hendak dicapai adalah terlaksananya pendidikan dan pengajaran secara merata, sekaligus menanamkan nilai-nilai persatuan di atas perbedaan (*bhinneka tunggal ika*).

Salah satu alasan mengapa Taman Siswa didirikan adalah kenyataan bahwa pemerintah kolonial sangat kikir dan sama sekali mengabaikan bidang pendidikan. Pelaksanaan Politik Etis (1901) ternyata juga bersifat elitis, hanya dinikmati oleh golongan tertentu, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial (Nasution, 1995: 15—35). Sesuai dengan sifat penjajah, pemerintah kolonial lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi politik, masalah-masalah yang memberikan keuntungan terhadap pemerintah Belanda itu sendiri.

Karena itulah, Dewantara mengalihkan perhatiannya pada pendidikan nasional, dengan maksud agar dapat membantu keterbelakangan masyarakat. Pendidikan dengan sendirinya bukan semata-mata untuk memperoleh kualitas intelektualitas, tetapi yang lebih penting untuk membangkitkan kesadaran nasional.

b. Konsep dan Gagasan Ki Hadjar Dewantara

Konsep dan gagasan merupakan buah-buah pikiran yang terpenting dalam kaitannya dengan sistem dan model pendidikan modern. Sejak berdirinya Taman Siswa, tahun 1922, bahkan sebelumnya, Dewantara telah memformulasikan pikiran-pikirannya yang berkaitan dengan sistem pendidikan modern. Berbeda dengan sistem pendidikan kolonial yang didasarkan atas pendidikan Barat dan dengan sendirinya bertujuan untuk menopang pemerintah kolonial, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Dewantara didasarkan atas keseimbangan yang dinamis, sebagai akulturasi antara metode dan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh asing dengan sistem yang digali melalui masyarakat Indonesia.

Di satu pihak, melalui perkenalannya dengan tokoh-tokoh asing Dewantara mengadopsi konsep-konsep yang dikembangkan oleh Tagore, Montessori, dan Froebel, di pihak yang lain, sistem *paguron* digali melalui interaksi formal masyarakat lama yang telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Sistem pondok tersebut dianggap tepat sebab mempertimbangkan keterlibatan seluruh komponen pendukungnya, seperti: murid dan guru, rumah dan masyarakat, dan berbagai keterampilan yang menyertainya. Tujuan utama pendidikan bukanlah kualitas intelektualitas semata-mata, melainkan keseimbangan yang dinamis dan proporsional antara keduanya, yaitu antara pendidikan dan pengajaran, antara emosionalitas dan intelektualitas, antara kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani.

Sebagai elite intelektual modern, dengan pengalaman yang cukup lama di negeri Belanda, Dewantara mengenal dengan jelas sistem pendidikan Barat. Meskipun demikian, setelah kembali ke Indonesia, Dewantara tidak mengembangkan sistem pendidikan tersebut di Indonesia, tetapi justru menggali gagasan-gagasan yang asli, yang dengan sendirinya sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dewantara memanfaatkan pengalamannya sebagai relasi oposisi sehingga lebih mematangkan konsep-konsep asli yang berhasil digalinya. Kenyataan menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut masih relevan sampai sekarang.

Tut wuri handayani dianggap sebagai semboyan, moto, bahkan jiwa dan roh dalam mengembangkan pendidikan modern. Berbeda dengan pendidikan Barat, yang seolah-olah memaksa agar anak didik memiliki kadar intelektualitas yang tinggi, Taman Siswa mendidik dengan cara membimbing dan mengarahkan dari belakang, sambil memberikan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan cara tersebut maka anak didik akan berkembang sesuai dengan bakat dan lingkungannya, dalam konstruksi konvergensi. Mendidik dengan cara mengarahkan dari belakang jelas lebih tepat dalam kaitannya dengan usaha-usaha untuk menggali bakat-bakat yang terpendam sebab dilakukan secara alamiah, menurut kondisi-kondisi internal anak didik.

Trikon, yang diringkas melalui konsep kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas, juga merupakan konsep penting, dipertimbangkan sebagai konsep yang relevan dalam pendidikan modern (Majelis Luhur Taman Siswa, Vol. IA, 1962: 206) Dalam rangka menciptakan kebudayaan baru, dalam kaitannya dengan polarisasi antara kebudayaan lama dan baru, maka akan timbul tiga kemungkinan, yaitu (1) timbulnya gejala-gejala yang baru, (2) berubahnya aspek-aspek kebudayaan yang lama, dan (3) kekalnya untuk sementara aspek-aspek kebudayaan yang lama. Karena itu, kebudayaan yang baru adalah lanjutan kebudayaan sendiri (kontinuitas), dalam rangka menuju kebudayaan dunia (konvergensi), tetapi tetap memiliki sifat kepribadian (konsentrisitas).

Sebagai elite intelektual yang sangat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, termasuk kebudayaan keraton, Dewantara banyak sekali memanfaatkan konsep yang berkaitan dengan tradisi. Sesuai dengan tujuannya, seperti disebutkan di atas, Dewantara bermaksud untuk mengarahkan pendidikan dan pengajaran demi terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian sendiri. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi keberagaman suku, ras, dan agama, sehingga dapat diperoleh suatu persamaan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam hubungan ini ternyata bahwa Dewantara bukan saja tokoh intelektual, tetapi juga politik, pendidik, dan budayawan, bahkan sebagai negarawan.

c. Pendidikan dan Pengajaran untuk Kaum Wanita

Sebagai tokoh pendidikan nasional, Dewantara sangat memperhatikan pendidikan dan pengajaran kaum wanita. Sejak awal berdirinya Taman Siswa telah mensyaratkan agar kaum wanita diberikan perhatian khusus sesuai dengan kemampuannya. Sebagai bangsa yang besar, baik dari segi jumlah penduduk secara keseluruhan maupun keragaman adat-istiadat dan kebudayaannya, kaum wanita jelas memegang peranan yang menentukan. Benar, bahwa pada awalnya, sebelum masuknya unsur-unsur kebudayaan asing, kaum wanita dianggap sebagai memiliki posisi sekunder dalam masyarakat, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20, telah terjadi pergeseran secara signifikan terhadap posisi kaum wanita. Taman Siswa telah memicu kesadaran kaum wanita tersebut.

Dengan panjang lebar Dewantara (Majelis Luhur Taman Siswa, Vol. II A, 1967: 236—261) menjelaskan ciri-ciri kaum wanita, baik jasmani maupun rohaninya. Secara historis, sejak kehadiran Adam dan Hawa, wanita adalah relasi oposisi, antagonis, sekaligus kawan yang setia kaum pria. Semata-mata karena kondisi fisik yang diterimanya secara alamiahlah yang menyebabkan kaum wanita secara terus-

menerus ter subordinasikan terhadap lawan jenisnya. Dalam masyarakat patriarkhat, wanita dikondisikan secara kultur, dianggap sebagai kelompok marginal terhadap pria yang menduduki posisi sentral. Dalam masyarakat modern pun kondisi-kondisi disharmoni tersebut belum bisa dikualifikasikan secara proporsional. Bidang politik, ekonomi, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya tetap didominasi oleh kaum pria. Hegemoni kaum pria bertambah kuat dengan berkembangnya teknologi informasi, dan justru ditopang oleh kondisi-kondisi kaum wanita yang ternyata kemudian sering gagal untuk memperjuangkan hak-haknya.

Dikaitkan dengan dunia pendidikan, menurut Dewantara, wanita semestinya diberikan tugas yang lebih banyak. Wanitalah yang mengandung dan melahirkan bayi, dan dengan sendirinya wanita pulalah yang memberikan pendidikan awal terhadap anak-anak. Sejak lahir hingga usia prasekolah, pendidikan juga dipegang oleh kaum wanita. Karena itu, menurut Dewantara, guru-guru, khususnya pada tingkat sekolah dasar pada dasarnya lebih tepat apabila ditugaskan pada kaum wanita. Dikaitkan dengan emosi-emosi yang dimilikinya, wanita ternyata memiliki sifat-sifat yang lebih sabar, lebih sayang, lebih etis dan estetik apabila dibandingkan dengan kaum pria.

Pengaruh kewanitaan dengan sendirinya juga tampak di rumah tangga. Ketenangan, kerapian, kesejukan, dan kelestarian rumah tangga, termasuk keharmonisan antarhubungan anggota rumah tangga pada dasarnya dikondisikan oleh seberapa jauh peranan kaum wanita di dalamnya. Secara fisik wanita memang lemah tetapi secara psikologis mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan sosial. Melalui kehalusan dan keramah-tamahan budi pekertinya, wanita dianggap sebagai contoh dan teladan, yang dengan sendirinya akan merupakan motivasi positif terhadap kaum pria.

Doktrin mengenai kesadaran kaum wanita, emansipasi dalam pengertian yang lebih modern, akar-akarnya sudah terkandung dalam

surat-surat Kartini. Doktrin tersebut, di samping memiliki tujuan pokok dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita, juga menunjukkan kecenderungan-kecenderungan sosial yang erat berkaitan dengan kepribadian bangsa, di antaranya: 1) kesadaran bagi makhluk yang lebih kuat untuk melindungi makhluk yang lebih lemah, 2) kesadaran bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, 3) kesadaran untuk menghapuskan perbedaan status sosial, 4) kesadaran untuk mengurangi kepentingan-kepentingan individual, dan 5) kesadaran untuk memajukan bangsa dalam segala bidang. Emansipasi pada gilirannya lebih dari sekedar memperjuangkan persamaan hak. Emansipasi dapat dilakukan hanya melalui kesadaran oponen untuk melepaskan dominasi, distorsi, otoritas, dan berbagai sistem simbol yang pada dasarnya berfungsi untuk mensubordinasikan kaum wanita.

d. Pendidikan Nasional: Menggali Kepribadian melalui Metode-metode Baru

Secara historis Taman Siswa didirikan untuk mengantisipasi ketidakpuasan terhadap sistem, model, dan politik pendidikan pemerintah jajahan. Pendidikan dan pengajaran Belanda dianggap sebagai memiliki dua kelemahan pokok, yaitu (1) terlalu menekankan intelektualitas, dan (2) fungsi dan tujuannya semata-mata demi kepentingan penjajah Belanda. Atas dasar kedua aspek negatif tersebutlah kelompok elite intelektual Indonesia, khususnya Dewantara, menyelenggarakan pendidikan sekolah swasta.

Pendidikan nasional didirikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk memajukan bangsa Indonesia. Lembaga, guru-guru pengajar, dan para murid, sejak semula telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga mudah untuk mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi, baik sebagai akibat kesulitan ekonomi, yaitu kekurangan dana, maupun politik, yaitu larangan pemerintah kolonial.

Perhatian terhadap dasar-dasar kepribadian dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam kebudayaan asli, dalam konvensi dan tradisi sesungguhnya terkandung khazanah sosiokultural yang sangat kaya. Peninggalan-peninggalan sejarah dan arkeologi menunjukkan bahwa di kepulauan Nusantara terkandung berbagai masalah yang berkaitan dengan etika, estetika, religi, dan masalah-masalah kultural lainnya. Masalah-masalah tersebut memiliki peranan besar dalam rangka membangun suatu kebudayaan yang baru atas dasar kebudayaan yang sudah ada. Karena itu, masalah-masalah tersebut perlu digali dan dikembangkan, khususnya dalam rangka untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang baru.

Menggal aspek-aspek kepribadian dan khazanah tradisi lainnya tidak harus dilakukan dengan cara-cara lama. Sebaliknya, sebagai alat, metode harus selalu baru, bahkan terbaru. Karena itulah, dalam pelaksanaannya Dewantara secara terus-menerus memanfaatkan cara-cara yang paling mutakhir yang dianggap relevan. Sebagai perguruan nasional yang telah diakui popularitasnya di Indonesia, Taman Siswa juga memiliki hubungan dengan perguruan di luar negeri, lembaga-lembaga pendidikan yang telah berhasil dalam memajukan bangsanya, seperti *Shanti Niketan* (Tempat yang Damai) pimpinan Rabindranath Tagore di India, perguruan *Casa deibambini* (Rumah untuk Merawat Anak-anak) pimpinan Montessori di Italia, dan *Kindergarten* (Taman Anak-anak) pimpinan Frobel di Jerman.

Persamaan yang ditunjukkan di antara perguruan tersebut adalah: 1) kebebasan terhadap anak didik, 2) mengurangi kekuasaan guru dan orang tua, dan 3) anak didik dikembalikan ke alam. Semua perguruan juga memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak sebab usia tersebut merupakan dasar, yang kemudian akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Secara biologis, perkembangan otak juga sangat ditentukan oleh perkembangannya ketika anak-anak. Artinya, apabila pada masa anak-anak otak tersebut sudah dilatih secara

intensif maka kemungkinan perkembangannya dapat diharapkan akan lebih baik. Permainan bagi anak-anak, misalnya, bukan sekedar bermain, tetapi sebagai sekolah itu sendiri.

e. Pendidikan Nasional: Dasar Pendidikan Modern

Pembicaraan mengenai pendidikan nasional dalam kaitannya dengan zaman kemerdekaan, termasuk prediksi pendidikan dan pengajaran yang akan datang, perlu diberikan alasan-alasan yang lebih mendasar dengan pertimbangan bahwa kemajuan bangsa yang sesungguhnya terletak dalam kemajuan pendidikan dan pengajarannya. Kebesaran bangsa Indonesia seharusnya juga disertai dengan kemajuan bidang pendidikannya, sehingga terjadi keseimbangan antara faktor-faktor infrastruktur material dengan superstruktur ideologisnya. Dengan kalimat lain, kekayaan alam yang melimpah harus disertai dengan kemampuan intelektualitas dalam pengelolaannya, sehingga masyarakat adil makmur dan merata dapat dicapai.

Kenyataan menunjukkan, sampai dengan awal abad ke-21 ini, masih terjadi ketidakseimbangan yang cukup mencolok antara kedua faktor di atas. Kekayaan alam yang telah dianugerahkan kepada nenek moyang, yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya hingga sekarang, ternyata tidak berhasil untuk diperlihara sebagaimana mestinya. Justru sebaliknya, kekayaan alam dieksploitasi demi kepentingan kelompok, pribadi, dan penguasa tertentu. Masalah yang lebih memprihatinkan adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengeksploitasi sama sekali tidak didasarkan atas sifat-sifat dasarnya, melainkan semata-mata atas kepentingan manusia sehingga terjadi pengerusakan, penghancuran, dan pemerkosaan eksistensi ekologis secara keseluruhan.

Pendidikan Taman Siswa, termasuk sekolah-sekolah swasta lainnya, sejak awal berdirinya sesungguhnya telah menyadari kemungkinan-kemungkinan di atas. Hal ini didasarkan atas pengalaman

pada masa penjajahan Belanda, di mana pemerintah kolonial secara hampir membabi buta mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, dengan sendirinya tanpa memperhitungkan kelestariannya, demi kepentingan penjajah. Selama tiga setengah abad dijajah, bangsa Indonesia sama sekali tidak merasakan menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.

Apabila pada masa penjajahan keterbelakangan pendidikan dan pengajaran diakibatkan oleh politik kolonial, maka pada masa sesudah kemerdekaan faktor-faktornya sekaligus terkandung dalam: 1) pemerintah republik, dan 2) bangsa Indonesia itu sendiri. Sejak kemerdekaan diproklamasikan hingga sekarang, bidang pendidikan belum pernah memperoleh perhatian yang memadai, baik dari segi pembiayaan maupun dorongan dan semangat itu sendiri. Pemerintah sangat lemah dalam menopang sarana dan prasarana, dan sangat lambat dalam mengantisipasi berbagai kemajuan. Alasannya karena pemerintah diperhadapkan pada berbagai masalah yang harus dipecahkan terlebih dahulu, seperti politik dan ekonomi. Karena itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan kultural, termasuk pendidikan, menjadi masalah sekunder.

Hal-hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia dengan sendirinya merupakan masalah yang lebih besar sekaligus lebih serius. Pertama, jumlah penduduk yang cukup besar dan tersebar di pelosok-pelosok tanah air, sangat sulit untuk dijangkau oleh sistem informasi modern, sehingga tidak mungkin untuk memberikan kesadaran yang memadai mengenai perlunya pendidikan dan pengajaran. Kedua, sebagai bangsa yang sangat lama berada di bawah pemerintah kolonial, juga sangat sulit untuk memberikan kesadaran bahwa pendidikan dan pengajaran itu penting. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana informasi, khususnya media massa dan buku-buku bacaan, jelas juga mempersulit untuk memberikan kesadaran tersebut.

Taman Siswa telah menyadari kemungkinan-kemungkinan di atas. Sistem paguron, misalnya, dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan sistem pondok di satu pihak, dan menanggulangi kekurangan biaya di pihak yang lain. Sistem paguron, yang sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman dahulu dengan sendirinya secara tidak langsung membangkitkan minat untuk belajar. Artinya, masyarakat diperkenalkan dengan sistem yang sudah diketahui sebelumnya, bukan dengan cara-cara modern, sehingga masyarakat merasakan seperti berada di lingkungannya sendiri. Dari segi pendanaan pun dapat diatasi sebab dengan sistem paguron terjadi saling membantu antara masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu. Karena itulah, Taman Siswa dapat berjalan terus meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit.

Tujuan Taman Siswa, seperti telah disebutkan di atas, bukan semata-mata kemajuan bangsa dalam pendidikan. Sejak awal berdirinya, Taman Siswa telah menanamkan kesadaran, baik terhadap para guru maupun siswanya, bahwa Taman Siswa sekaligus berjuang dalam bidang pendidikan dan kemerdekaan, jadi sekaligus sebagai gerakan kultural dan politis (Majelis Luhur Taman Siswa, Vol. IA, 1962: 196). Gerakan kultural dimaksudkan adalah mendidik bangsa, mengejar ketertinggalan sebagai akibat penjajahan yang berkepanjangan. Gerakan politik jelas bertujuan untuk mempersatukan bangsa dari Sabang hingga Meraoke, menghapuskan disintegrasi sebagai akibat politik *divide et impera*. Cita-cita tersebut merupakan akibat keterlibatan langsung Dewantara dalam dunia politik, sebelum mendirikan Taman Siswa.

Sebagai gerakan kultural dan politis, Taman Siswa telah banyak berjasa, menginvestasikan kesadaran bahwa kemajuan suatu bangsa dapat terwujud semata-mata melalui kemajuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Taman Siswa, bersama-sama dengan perguruan swasta lainnya, baik yang masih berjalan hingga sekarang maupun yang sudah mengakhiri masa bhaktinya, jelas telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan bangsa Indonesia. Generasi berikut-

nya, khususnya generasi yang ada sekarang ini, wajib memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dengan cara meneruskan cita-cita tersebut, yaitu mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dikaitkan dengan jasa Dewantara yang sudah mengabdikan dirinya secara keseluruhan demi kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, maka pemerintah telah menetapkan hari lahirnya, yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dewantara dengan Taman Siswa-nya telah menjadi sejarah, tetapi cita-citanya masih hidup dan akan terus hidup, menuntut pertanggungjawabannya kepada generasi sekarang dan generasi seterusnya. Mampukah bangsa Indonesia untuk mengatasinya? Jawabannya ada dua kemungkinan, apabila mampu, berarti dunia pendidikan sekarang sudah baik, sebaliknya, apabila tidak mampu, berarti dunia pendidikan sekarang belum baik. Ada kecenderungan bahwa yang terjadi adalah yang terakhir.

KESIMPULAN

Ki Hadjar Dewantara telah menjadi mitos. Pergantian namanya melambangkan perubahan sistem, dari Jawa ke Indonesia, dari birokrasi ke demokrasi, dari kolonial ke nasional, dan dari tradisi ke modernisasi.

Selama delapan dasawarsa sejak berdirinya hingga sekarang Taman Siswa telah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Sumbangan yang dimaksudkan tidak terbatas dalam bentuk keluaran sumber daya manusia secara nyata, tetapi yang lebih penting justru sumbangan dalam bentuk moral dan spiritual, jiwa dan semangat, ambisi dan motivasinya dalam menopang terbentuknya kebudayaan Indonesia modern.

Metode-metode pendidikan dan pengajaran yang ditanamkan dalam Taman Siswa, dengan menggali melalui khazanah kebudayaan asli, dengan menggabungkannya dengan metode-metode asing, ternyata jauh

lebih berhasil dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, termasuk dalam rangka mengantisipasi disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, B. S. (1989). *Ki Hadjar Dewantara: Ayahku*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Majelis Luhur Taman Siswa. (1962). *Karya Ki Hadjar Dewantara, Vol. IA, Pendidikan*: Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- . (1967). *Karya Ki Hadjar Dewantara, Vol. II A, Kebudayaan*: Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Nasution, S. (1995). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tauchid, M. (1968). *Ki Hadjar Dewantara: Pahlawan dan Pelopor Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Tsuchiyi, K. (1987). *Democracy and Leadership: the Rise of the Taman Siswa. Movement in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.